

DAFTAR PUSTAKA

- Adams Wahiduddin, 2012, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam Dinal Fedrian dkk, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Agung Marsallindo, 2019, *Dampak Hate Speech Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2018*. Skripsi. Fisip, Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.
- Ali Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Aminuddin Ilmar, 2021, *Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan (Bestuursrecht, Government Law)*, Makassar: UPT Unhas Press.
- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anggraeni Dewi, Adrinoviarini, 2020, *Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)*, Al WASATH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No.2, 99-116.
- Arifulloh Achmad, 2015, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, No.2.
- Arikunto Suharsimi, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakri, S., Zulhazmi, A.Z., & Laksono, K, 2019, *Menanggulangi Hoaks Dan Ujaran Kebencian Bermuatan Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Di Tahun Politik*. Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 4(2), 199–234.
- Budirjo Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Cambel, 1989, *Riset dalam Evektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga.
- Cummings, L, 2007, *Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner* (1 ed.). (A. S. Ibrahim, Ed., E. setiawati, sunoto, & dkk, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD*

- 1945, Jogjakarta: Liberty.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32
- Effendi Erdianto. 2020, *Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan*, Riau Law Journal: Vol. 4, No. 1, 23-38.
- Gustia, 2020, Tesis: "*Pelaksanaan Wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*" (Makassar: Universitas Hasanuddin).
- Hadi Sutrisno, 1993, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Juditha Christiany. "*Hatespeech Di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017*", (Jurnal), Jakarta: Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Manullang, M., 1977, *Dasar-dasar Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Margono, 1997, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mulyana, 2010, *Kajian Wacana : Teori, Metode & Prinsip-prinsip Analisis Wacana*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moleong Lexy J, 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Musyafak, N., & Ulama'i, A. H. A. A, 2019, "*Narasi Ujaran Kebencian*

- dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)”, Jurnal Ilmu Dakwah, 39(2).*
- M. Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- M. Taufan Perdana, Moh. Alfari, Anik Iftitah, 2020, *Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/Puu-Xvii/2019*, Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 1.
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Ni”matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin.
- Pahad, *”Hate Speech (Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi)”*, (Jurnal), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Prakoso Djoko, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Prayudi, Ahmad Budiman dan Aryojati Ardipandanto., 2017, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, (ed., Haris Syamsuddin), Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2010, *Statistik untuk pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, 2002, *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Surbakti Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Susanto Yoki, 2019, *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Journal of Scientific Communication Volume 1 Issue 1.
- Sutrisno Edi, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Suyatno, 2016, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*, Politik Indonesia: Indonesian

Political Science Review 1 (2), 212-230.

Syaukani, AffanGaffar, M. Ryass Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Kerjasama Pusataka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan.

Tim Imparsial, 2017, *Buku Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia*, Jakarta: Imparsial..

Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika.

Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta, cet-1.

Referensi Internet

DetikNews, “Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian”, 29 Desember 2017, diakses pada laman <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>, tanggal 25 April 2022 , pukul 10:26 Wita

Ayu Yuliani, “Ujaran Kebencian Picu Generasi Muda Jadi Intoleran dan Diskriminatif”, 12 Desember Desember, diakses pada laman https://kominfo.go.id/content/detail/11958/ujaran-kebencian-picu-generasi-muda-jadi-intoleran-dan-diskriminatif/0/sorotan_media, tanggal 26 April 2022, pukul 11.05 Wita.

Bawaslu Republik Indonesia. Profil Bawaslu RI. diakses pada laman <https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>. tanggal 03 Juni 2022, pukul 01:21. Wita

Dosen Pendidikan 2, “Demokrasi – Pengertian, Macam, Prinsip, Ciri, Sejarah Dan Contohnya”, 20 Mei 2022, <https://www.dosenpendidikan.co.id/demokrasi/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022 , pukul 20:37 Wita

Jurnal Adhyasta Pemilu, *Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Adhyasta Pemilu*, 21 Desember 2021, diakses pada laman <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/issue/view/9> ,tanggal 25 Mei 2022 pukul 09.03 Wita

KBBI Daring, 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses pada laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, tanggal 23 Mei 2022, pukul 10.16 Wita.

KBBI Daring, 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Republik Indonesia, diakses pada laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengawasi>, tanggal 23 Mei 2022, pukul 12.09 Wita.

Yusuf Abdhul, "*Pengertian Empiris: Data, Kekurangan dan Kelebihan*", 15 September 2022, diakses pada laman <https://deepublishstore.com/empiris-adalah/>, tanggal 19 September 2022, pukul 1:16 Wita

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.